

ABSTRAK

Nikolas Beburak, 19.75.6644. **Konflik Perampasan Tanah Adat Masyarakat Adat Pubabu-Besipae, Amanuban Selatan: Tinjauan Kritis Dalam Perspektif Teologi Pembebasan.** Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Filsafat dan Teknologi Kreatif, 2026.

Konflik tanah adat antara masyarakat adat dengan negara (pemerintah) merupakan persoalan serius yang semakin marak terjadi. Tindakan pencaplokan tanah adat oleh pemerintah dengan dalih pembangunan tidak hanya mengancam eksistensi masyarakat adat, tetapi juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti konflik tanah adat yang dialami oleh masyarakat adat Pubabu-Besipae, Amanuban Selatan, dalam perspektif teologi pembebasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan observasi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara. Pertama, pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta berbagai artikel media daring dan luring yang dianalisis secara kualitatif. Kedua, observasi langsung di lokasi penelitian, yakni di Pubabu-Besipae, Amanuban Selatan, dengan menghubungi para informan untuk mengkonfirmasi data-data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teologi pembebasan dapat dipahami sebagai suara profetik di tengah realitas penindasan, alienasi, dan diskriminasi yang disebabkan oleh kelompok kapitalis maupun negara yang kuat. Melalui penelusuran terhadap konflik masyarakat adat Pubabu-Besipae melawan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penelitian ini menemukan berbagai tipologi konflik dan faktor penyebabnya, serta menggambarkan peran Gereja sebagai agen pembebas.

Penelitian ini menegaskan bahwa Gereja, baik sebagai institusi maupun melalui pribadi-pribadi di dalamnya, hendaknya berani menyuarakan keadilan bagi masyarakat yang tertindas dan terdiskriminasi, khususnya masyarakat adat. Skripsi ini juga mengajak seluruh umat Kristiani untuk terlibat aktif dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Dengan demikian, tindakan memperjuangkan keadilan bagi kaum miskin dan tertindas merupakan partisipasi nyata umat Kristiani dalam menghidupi nilai-nilai injili, yakni keadilan, perdamaian, dan cinta kasih di tengah dunia.

Kata Kunci: Konflik Tanah Adat, Masyarakat Adat Pubabu-Besipae, Pemprov NTT, Teologi Pembebasan, dan Gereja.

ABSTRACT

Nikolas Beburak, 19.75.6644. **The Conflict Over the Seizure of Indigenous Land of the Pubabu-Besipae Indigenous Community, South Amanuban: A Critical Review from the Perspective of Liberation Theology.** Undergraduate Thesis. Bachelor's Program, Department of Philosophy and Creative Technology. 2026.

Conflicts over customary land between indigenous communities and the state (government) are a serious issue that is becoming increasingly prevalent. The government's seizure of customary land under the pretext of development not only threatens the existence of indigenous communities but also constitutes a violation of human rights.

This study aims to highlight the indigenous land conflict experienced by the Pubabu-Besipae indigenous community in South Amanuban from a liberation theology perspective. This study employs a qualitative descriptive method supplemented by field observations. Data collection was conducted through two methods. First, the use of secondary data sourced from books, scientific journals, and various online and offline media articles, which were analyzed qualitatively. Second, direct observation at the research site—Pubabu-Besipae, South Amanuban—by contacting informants to confirm data obtained from various sources.

The research findings indicate that liberation theology can be understood as a prophetic voice amidst the realities of oppression, alienation, and discrimination caused by capitalist groups and powerful states. Through an examination of the conflict between the Pubabu-Besipae indigenous community and the East Nusa Tenggara Provincial Government, this study identified various conflict typologies and their underlying causes, while also illustrating the Church's role as an agent of liberation.

This study emphasizes that the Church, both as an institution and through the individuals within it, should courageously advocate for justice on behalf of oppressed and discriminated-against communities, particularly indigenous peoples. This thesis also calls upon all Christians to actively engage in the struggle for justice and peace. Thus, the act of fighting for justice for the poor and oppressed constitutes a tangible participation by Christians in living out the Gospel values—namely, justice, peace, and love—in the midst of the world.

Keywords: Indigenous Land Conflict, Pubabu-Besipae Indigenous Community, NTT Provincial Government, Liberation Theology, and Church.